

ANALISIS PROGRAM KERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI MASALAH LGBT DI KOTA BUKITTINGGI

Oleh:

Elvi Rahmi, S. Pd, I, MA

Yosi Aryanti, S. Ag, MA

M. Yemmardhotillah, S.Pd.I, MA

ABSTRAK

Fenomena yang terjadi saat ini menjadi sebuah isu dimasyarakat adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). LGBT telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia khususnya Bukittinggi. Orientasi seksual terkadang merupakan sesuatu yang sulit diterima pada sebagian masyarakat. Padahal sebagai manusia, mereka sama dengan manusia biasa pada umumnya yang butuh berinteraksi dan mengekspresikan gender. Pengendalian sosial dan sikap masyarakat terhadap satu sama lain lebih kepada kepentingan masing-masing sehingga muncul berbagai wujud penerimaan atau penolakan terhadap hadirnya LGBT di Bukittinggi. Pemerintah Daerah Bukittinggi harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari masyarakat Bukittinggi. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama dalam bentuk program kerja yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi Perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi keberadaannya telah terdeteksi lebih kurang dalam dua tahun terakhir. Untuk bisa mendapatkan data perkembangan komunitas LGBT ini, diperoleh melalui data-data yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bukittinggi. Hal ini di tandai bahwa dari penderita HIV/AIDS yang ditemui oleh KPA terdapat diantaranya dari komunitas LGBT. 2) Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Perkembangan LGBT Di Kota Bukittinggi adalah: (a) Intervensi Perubahan prilaku. Agar Intervensi ini bisa tercapai maka FORSIS melakukan intervensi ini dengan sebuah proses yang jelas dengan cara melakukan pendekatan secara emosional untuk bisa memberikan arahan, dengan menggunakan langkah jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendampingi strategi perubahan perilaku melalui pendidikan dan regulasi dengan strategi paksaan atau *enforcement*. (b) Peningkatan Iman dan Taqwa. Upaya ini dilakukan pemda dengan menjalin kordinasi dengan MUI kota Bukittinggi. Beberapa penyuluhan dan sosialisasi terhadap prilaku menyimpang diharapkan agar seluruh masyarakat mewaspadaai untuk berkembangnya komunitas ini. Hibauan dan seruan untuk mewaspadaai ini sudah disampaikan juga kepada lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Peningkatan iman dan taqwa oleh masing-masing keluarga tetap menjadi modal utama dalam upaya penanggulangan LGBT di Bukittinggi. (c) Pendekatan psikologi. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan memberikan motivasi yang kuat dari lingkungan keluarga terdekat. Motivasi yang kuat bisa berkembang dengan meningkatkan ketaqwaan, karena taqwa merupakan sumber dari sebuah motivasi. Setiap

komunitas diberikan pendampingan untuk kembali menyadari bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku yang secara kodrati kemanusiaan telah berlawanan dengan kodratnya masing-masing.

Kata Kunci: *Program Kerja Pemda, LGBT*

PENDAHULUAN

Suatu fenomena yang pada saat ini menjadi sebuah isu dimasyarakat yaitu mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Dewasa ini LGBT dipakai untuk menunjukkan seseorang atau siapapun yang mempunyai perbedaan orientasi seksual dan identitas gender berdasarkan kultur tradisional, yaitu heteroseksual. Lebih mudahnya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas non-heteroseksual seperti homoseksual, biseksual, atau yang lain dapat disebut LGBT.

LGBT (Lesbian Gay Besexual dan Transgender) telah menjadi permasalahan yang sangat serius diseluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Orientasi seksual terkadang merupakan sesuatu yang sulit diterima pada sebagian masyarakat. Padahal sebagai manusia, mereka sama dengan manusia biasa pada umumnya yang butuh berinteraksi dan mengekspresikan gender. Merujuk pada cara dimana seseorang berperilaku untuk mengkomunikasikan gendernya dalam budaya tertentu, misalnya dalam hal pakaian, pola komunikasi dan ketertarikan. Ekspresi gender mungkin tidak konsisten dengan peran gender secara sosial dan mungkin tidak mencerminkan identitas gendernya. Ekspresi gender adalah tentang kemaskulinan dan kefemininan seseorang yang ditampilkan kepada orang lain atau lingkungannya.

Penerimaan masyarakat terhadap kelompok ini masih kontroversial. Mayoritas masyarakat menganggap LGBT ini sebagai penyimpangan sosial, penyakit, dosa, perilaku yang amoral, bertentangan dengan nilai yang terinternalisasi dalam masyarakat yang menjelaskan adanya orientasi seksual laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Ketika ada laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan perempuan yang orientasi seksualnya terhadap perempuan (sesama jenis), masyarakat menganggap hal tersebut tidak wajar. Aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bab I pasal 1 tentang Dasar Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan ang Maha

Esa. Isi dari Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan sesama jenis di Indonesia. Namun, kenyataannya banyak hal yang terjadi di luar kendali agama dan pemerintah dengan dasar undang-undang tersebut. Praktik homoseksual marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia berdasarkan *given* (pemberian), *lifestyle* (gaya hidup), maupun adat istiadat.

Perspektif sosiologis tidak menjelaskan benar atau salah mengenai LGBT, namun melihat bagaimana hal tersebut terjadi di masyarakat sehingga muncul identitas dan dinamika LGBT tersebut khususnya di Indonesia. Aspek-aspek multikultur dan pluralism merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam budaya, etnis, ras, suku, agama, profesi, dan lain-lain. Kemajemukan ini mempengaruhi fenomena LGBT yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kota yang bisa disebut adalah Kota Bukittinggi. Kota budaya, pelajar, dan pariwisata melekat kuat pada kota yang penuh dengan keistimewaan ini. Banyaknya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia menciptakan dinamika kehidupan yang unik. Di Bukittinggi muncul interaksi antara pendatang dan penduduk lokal sehingga menciptakan penyesuaian nilai dan norma. Kesepakatan norma yang berlaku berdasarkan kebutuhan berbagai lapisan masyarakat menjadi peluang munculnya beraneka ragam fenomena sosial. LGBT salah satu fenomena yang terjadi di Bukittinggi. Pengendalian sosial dan sikap masyarakat terhadap satu sama lain lebih kepada kepentingan masing-masing sehingga muncul berbagai wujud penerimaan atau penolakan terhadap hadirnya LGBT di Bukittinggi.

Pemerintah Daerah Bukittinggi harus mempunyai suatu rencana yang matang guna menyikapi kondisi hadirnya LGBT sebagai bagian dari masyarakat Bukittinggi. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama dalam bentuk program kerja yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas pemerintahan. Mengingat besarnya manfaat program bagi suatu pemerintahan, maka program tersebut harus disusun secara baik dan perlu analisa tentang perkembangan dari program tersebut. Untuk itu membutuhkan kebijakan yang bagus dalam mengantisipasi berkembangnya LGBT.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung untuk menjadi bagian dari LGBT diantaranya adalah:

1. Keluarga. Pengalaman atau trauma di masa anak-anak misalnya: Dikasari oleh ayah atau ibu hingga si anak beranggapan semua pria atau perempuan bersikap kasar, dan bengis yang memungkinkan si anak merasa benci pada orang itu. Bagi seorang lesbian misalnya, pengalaman atau trauma yang dirasakan oleh para wanita dari saat anak-anak akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pria yaitu bapak, kakaknya maupun saudara laki-lakinya. Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria.¹ Selain itu, bagi golongan *transgender* faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kekeliruan gender adalah sikap orang tua yang mengidamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.
2. Pergaulan dan Lingkungan. Kebiasaan pergaulan dan lingkungan menjadi faktor terbesar menyumbang kepada kekacauan seksual ini yang mana salah seorang anggota keluarga tidak menunjukkan kasih sayang dan sikap orang tua yang memberikan penjelasan tentang seks adalah suatu yang tabu.² Keluarga yang terlalu mengekang anaknya. Bapak yang kurang menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Hubungan yang terlalu dekat dengan ibu sementara renggang dengan bapak. Kurang menerima pendidikan agama yang benar dari kecil. Selain itu, pergaulan dan lingkungan anak ketika berada di sekolah berasrama yang berpisah antara laki-laki dan perempuan turut mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.
3. Biologis. Ini terkait dengan genetika, ras, ataupun hormon. Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius.³ Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerak dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan. Di alam medis, pada dasarnya kromosom laki-

¹ Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), Cet.1, h. 85

² Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", Artikel diakses pada 20 May 2013, dari <http://www.utusan.com.my>

³ Sri Habsari, diakses pada 24 May 2013 dari <http://books.google.co.id>

laki normal adalah XY, sedangkan perempuan normal pula adalah XX. Bagi beberapa orang laki-laki itu memiliki genetik XXY. Dalam kondisi ini, laki-laki tersebut memiliki satu lagi kromosom X sebagai tambahan. Justru, perilakunya agak mirip dengan seorang perempuan.⁴

4. Faktor Moral dan Akhlak. Golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya ransangan seksual. Kerapuhan iman seseorang juga dapat menyebabkan segala kejahatan terjadi karena iman sajalah yang mampu menjadi benteng paling efektif dalam mengekang penyimpangan seksual.
5. Pengetahuan agama yang lemah. Selain itu, kurang pengetahuan dan pemahaman agama juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi terjadinya homoseksual. Pendidikan agama dan akhlak sangat penting dalam membentuk akal, pribadi dan pribadi individu itu. Pengetahuan agama memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan yang paling ideal dalam mendidik diri sendiri untuk membedakan yang mana baik dan yang mana yang sebaliknya, haram dan halal dan lain-lain.⁵

Faktor-faktor di atas dapat dipahami bahwa, pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait lainnya terutama keluarga. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam memberikan pendidikan alamiah yang melekat pada setiap rumah tangga. Institusi keluarga merupakan lingkungan pertama yang dijumpai anak dan memberikan pengaruh yang mendalam serta memegang peranan utama dalam proses perkembangan anak. Keluarga sebagai penanggung jawab utama terhadap pengembangan anak-anaknya. Kewajiban keluarga untuk mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan anak dari pengaruh yang jelek. Tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anak-anaknya tidak hanya pada masa sebelum anak memasuki jenjang prasekolah saja. Namun tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anak berlangsung seumur hidup. Hal ini dapat dipahami karena

⁴ Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, (Jurnal al-Islâm: May 2011) h. 35

⁵ Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, (T. t: Pinang SDN.BHD.), Cet.1, h. 16

menurut Islam, anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, dan bebas dari segala dosa. Ia menjadi baik atau buruk tergantung kepada pendidikan atau lingkungannya, bukan kepada tabi'atnya yang asli.

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدهاء

Artinya: "Diriwayatkan dari Adam, dari Ibn Abi Dza'b dari Azzuhri dari Abi Salamah ibn Abd Rahman dari Abi Hurairah r.a Nabi saw bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kedua orangtuanyalah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. sebagaimana binatang itu dilahirkan dengan lengkap. Apakah kamu melihat binatang lahir dengan terputus (hidung, telinga, dan sebagainya)?" (HR Bukhari)⁶

Jadi jelaslah betapa pentingnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan terhadap anak, sebab jika keluarga salah dalam mendidik maka akan berdampak negatif terhadap si anak hingga dewasa nanti. Salah satu dampak negatif yang terjadi saat ini di antaranya adalah penyimpangan seksual seperti yang dikenal dengan istilah LGBT. Padahal di dalam al-qur'an perilaku ini sangat dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُافِرَةُ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْهُمْ أَوْ كُفِّرَهُمْ آلِهَةً وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨٠﴾ لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ الَّذِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُافِرَةُ آلِهَةً حَتَّى اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقَ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأَلْحَادَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَالْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقُ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةُ لَا يَنْفَعُونَكَ مِنْهُنَّ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٨١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ الَّذِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُافِرَةُ آلِهَةً حَتَّى اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقَ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأَلْحَادَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَالْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقُ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةُ لَا يَنْفَعُونَكَ مِنْهُنَّ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ الَّذِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُافِرَةُ آلِهَةً حَتَّى اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقَ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأَلْحَادَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَالْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقُ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةُ لَا يَنْفَعُونَكَ مِنْهُنَّ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ لَقَدْ كَفَرَ الْكُفْرَ الْأَكْبَرُ الَّذِي اتَّخَذَتِ الْأُمَّمُورُ الْكُافِرَةُ آلِهَةً حَتَّى اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقَ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْأَلْحَادَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ وَالْحَمَلُ وَالْإِبْرَاقُ وَالْأَنْثَىٰ وَالشَّجَرَةُ لَا يَنْفَعُونَكَ مِنْهُنَّ وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ﴿٨٤﴾﴾

⁶ Rehani, Berawal dari Keluarga; Revolusi Belajar Cara Al-qur'an, (Jakarta: Hikmah, 2003), h. 28

Artinya: "Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan Dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia Termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa LGBT atau penyimpangan seksual tidak di perbolehkan. Akan tetapi, permasalahan yang muncul saat ini di Kota Bukittinggi adanya terlihat perilaku yang menyimpang yakni masalah LGBT. Ini merupakan sebuah indikasi yang menggambarkan bahwa perilaku tidak sesuai lagi dengan nilai dan prinsip utama masyarakat minangkabau yaitu "Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Hal ini tentu menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah daerah dan keluarga yang berada di kota Bukittinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Padahal tantangan global dan daya saing suatu pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia (berkarakter).

Beberapa kecendrungan yang menyebabkan LGBT berkembang, seperti yang telah digambarkan di atas sangat berpotensi terjadi di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata merupakan kota yang selalu disinggahi oleh para wisatawan baik wisatawan dalam maupun luar negeri. Kehadiran para wisatawan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pola hidup masyarakat Bukittinggi, baik itu pengaruh positif ataupun negatif.

Salah satu pengaruh negatif yang ditemukan seperti yang dikutip dari sindonews.com kejadian yang terjadi pada Sabtu dini hari tanggal 20 bulan februari 2016 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bukittinggi, Sumatera Barat menjaring sepuluh wanita yang diduga pasangan lesbian. Lima pasang wanita yang diduga lesbian itu dijaring saat berada di area parkir salah satu tempat hiburan malam di sebuah hotel di wilayah Manggih, Jalan Sukarno-Hatta, Kota Bukittinggi. Penjaringan

tersebut dilakukan bersama puluhan pengunjung tempat hiburan malam lainnya.⁷ Bahkan kalau dianalisa data yang diperoleh dari sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) Kota Bukittinggi, Bapak H. Marsal, BA bahwa perolehan kasus Penderita HIV/AIDS di tahun 2016 sampai bulan Juli berjumlah lebih kurang 504 kasus, dan penderita terbesar dari kasus tersebut berada pada kelompok LGBT.⁸ Ini memberikan gambaran bahwa pengembangan kelompok LGBT menunjukkan angka yang cukup signifikan.

Menanggapi dari permasalahan di atas, maka sangat dituntut peran pemerintah daerah selaku pemimpin untuk meninjau dan memperhatikan serta mengatasi kondisi yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan mengevaluasi program kerja yang telah direncanakan sehingga bisa menjadikan tolak ukur atas keberhasilan program tersebut. Mencermati permasalahan yang dideskripsikan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Program Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Lesbian Gay Bisexual and Transgender (LGBT) di Kota Bukittinggi**”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.⁹ Untuk itu, dalam penelitian ini memerlukan pengamatan langsung dan keterlibatan peneliti dalam berdialog dengan sumber penelitian. Dimana peneliti sebagai instrument utama (*the key instrument*) dapat menilai keadaan dan mengambil keputusan terhadap sesuatu dari data yang dikumpulkan atau informasi yang telah diperoleh tentang analisis program kerja pemerintah daerah dalam mengatasi berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dapat digambarkan analisis program kerja pemerintah daerah dalam mengatasi

⁷<http://daerah.sindonews.com/read/1086839/174/10-wanita-diduga-pasangan-lesbian-terjaring-razia-1455916255>di akses pada hari kamis tanggal 3 Maret 2016

⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Marsal sebagai Sekretaris KPA Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Oktober 2016

⁹ Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja RosdaKarya, 2011), h. 4

berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kota bukittinggi dalam hal ini di bawah koordinasi SEKDA yaitu Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Dinas kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan dan olah raga, Dinas Sosial dan tenaga kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Dinas Keagamaan yang berada di Kota Bukittinggi dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang analisis program kerja Pemda dan strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*) yang bertujuan agar data yang di peroleh lebih akurat.

HASIL PENELITIAN

A. Perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi

Perkembangan LGBT di wilayah Bukittinggi, tidak terbatas hanya di Kota Bukittinggi saja, melainkan juga tersebar di beberapa kota dan kabupaten sekitar Bukittinggi. LGBT merupakan salah satu kasus yang sangat cepat berkembang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sehingga dibutuhkan perhatian yang sangat serius. Khusus di Bukittinggi keberadaannya telah terdeteksi lebih kurang dalam dua tahun terakhir. Untuk bisa mendapatkan data perkembangan komunitas LGBT di Kota bukittinggi, peneliti memperolehnya melalui data-data yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bukittinggi.

Penjangkauan terhadap komunitas LGBT secara langsung sangat sulit terdeteksi, karena komunitas ini saling menutupi keberadaannya satu sama lain. KPA sebagai komisi yang mengatasi penanggulangan AIDS telah berhasil menemui keberadaan komunitas ini melalui pendekatan secara emosional. Hal ini di tandai bahwa dari penderita HIV/AIDS yang ditemui oleh KPA Kota Bukittinggi terdapat diantaranya dari komunitas LGBT. Diperolehnya data penderita HIV/AIDS dari komunitas LGBT ini memberikan indikasi bahwa perkembangan komunitas ini mengalami peningkatan terutama dalam dua tahun terakhir.¹⁰

Perkembangan komunitas LGBT di Bukittinggi menduduki posisi kedua di provinsi Sumatera Barat setelah kota Padang. Terutama untuk potensi Gay, banyak

¹⁰Wawancara dengan Bapak Marsal, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bukittinggi, Kamis, 27 Oktober 2016

yang berasal dari daerah sekitar Bukittinggi seperti Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kota Padang Panjang yang sering menjadikan Bukittinggi sebagai kota kunjungan wisata. Dalam operasional yang dilakukan oleh KPA dalam waktu dua tahun belakangan ini KPA sudah berkolaborasi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yaitu:

- a. FORSIS, LSM ini melakukan penjangkauan dan merujuk orang yang berisiko HIV/AIDS.
- b. New Padu Jiwa (NPJ). LSM ini melakukan pemberdayaan ekonomi produktif serta merehabilitasi.
- c. Persaudaraan Korban Nafsa Bukittinggi (PKNB), LSM ini melakukan advokasi bagi yang berisiko terkena HIV/AIDS, terutama dari kelompok pengguna narkoba.
- d. Kita Semua Sama (KISESA) bertujuan untuk mendampingi orang yang berisiko dan mengingatkan untuk kesehatannya.¹¹

Dari keempat LSM ini, satu-satunya LSM yang melakukan penjangkauan terhadap HIV/AIDS dari komunitas LGBT adalah FORSIS. Lembaga FORSIS merupakan sebuah LSM yang dinaungi langsung oleh *Global Fun*, yang di dalam jalur koordinasinya, FORSIS mengkoordinasikan kerjanya dengan PKNI, dilanjutkan melalui SPRITIA. Sebelum FORSIS di biayai langsung oleh Global FUN, penjangkauan LGBT di Bukittinggi dilakukan oleh lembaga Pelangi dan Taratak Jiwa yang pendanaannya langsung berasal dari luar negeri.¹²

Menurut keterangan dari Direktur FORSIS wilayah Sumatera Barat, Khairul Anwar, MH, bahwa FORSIS mempunyai seorang manajer program pada setiap daerah tingkat II. Khusus di Sumatera Barat FORSIS telah mendirikan sekretariat di tiga Kota, yaitu di Kota Bukittinggi, Kota Padang, dan Kota Solok. Untuk Program Manajer di Kota Bukittinggi di percayakan kepada Feri Irawan, S.Ag. yang sekretariatnya berada di Daerah Sarajo Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

FORSIS mempunyai lebih kurang 21 orang penjangkau. Para Penjangkau merupakan orang-orang yang berada dalam komunitas LGBT. Diangkatnya para

¹¹ Ibid

¹² Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar Rabu, tgl 2 november 2016 sebagai Direktur Forsis pada hari Rabu bulan Oktober 2016 dilengkapi dengan Dokumen Forsis Tahun 2016

pejangkau dari komunitas LGBT untuk memberikan peluang bagi FORSIS agar bisa mengetahui komunitas LGBT, lingkungan hidupnya serta pola hidup mereka masing-masing. Komunitas LGBT untuk daerah Sumatera Barat terlihat dari laporan Data KEMENKES 2016 tentang kelompok-kelompok berisiko Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat tabel berikut ¹³:

Tabel.1
Kelompok Berisiko HIV/AIDS
Provinsi Sumatera Barat

No	Kelompok	Jumlah
1	MSL/LSL	14.459
2	FSW/WP	16.132
3	Klien FSW/WPS	221.435
4	TG/Waria	878
5	Klien TG/Waria	8.145
6	PWID/Penasun	900
7	Pasangan PWID/Penasun	450

Sementara itu FORSIS sebagai pelaksana program GF NFM SPRITIA-PKNI menetapkan data dari Jumlah Target Jangkauan bulan Maret sampai bulan Juni 2016 terdapat data Gay dengan jumlah 480 orang, trans gender 20 orang. Sementara jumlah Target Jangkauan Juli sampai Desember 2016 terdapat jumlah Gay 1.225 orang, 70 orang dari trans gender.¹⁴

Selama rentang tahun 2016, para penjangkau telah mendapatkan data capaian gay dan trans gender pada bulan Mei sampai dengan Agustus. Data tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.¹⁵

Tabel. 2
Capaian Gay Tahun 2016

Bulan	Jangkaun	VCT
April	155	68
Mei	214	92
Juni	194	74
Juli	214	48
Agustus	206	68
Jumlah	983	350

¹³Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar sebagai Direktur Forsis pada hari Rabu bulan Oktober 2016 dilengkapi dengan Dokumen Forsis Tahun 2016.

¹⁴ Dokumen Forsis Kota Bukittinggi Tahun 2016.

¹⁵ Ibid

Tabel. 3
Capaian Trans Gender Tahun 2016

Bulan	Jangkaun	VCT
April	0	0
Mei	0	0
Juni	5	5
Juli	0	0
Agustus	21	0
Jumlah	26	5

Data pencapaian terhadap Gay dan Transgender yang diperoleh dari FORSIS ini menggambarkan bahwa sebanyak 983 orang gay dan 26 orang transgender telah di jangkau semenjak bulan April sampai bulan Agustus. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 orang gay dan 5 orang Transgender telah melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan yang difasilitasi oleh KPA. Tujuan melakukan kunjungan ini adalah untuk memeriksakan diri mereka apakah kelompok ini beresiko terkena HIV/AIDS.

Berdasarkan keterangan dari KPA Kota Bukittinggi, Kelompok Gay yang telah melakukan kunjungan ke dinas kesehatan dan dinyatakan positif mengidap HIV/AIDS dari bulan Januari sampai dengan bulan agustus 2016 tergambar sebagaimana data dalam tabel berikut¹⁶:

Tabel. 4
Kelompok Gay Penderita HIV/AIDS Tahun 2016

No	Bulan Laporan	Jumlah	Ket
1	Januari	3	3 Non Reaktif
2	Februari	8	6 Reaktif, 2 Non Reaktif
3	Maret	2	2 Reaktif
4	April	10	3 Reaktif, 7 Non Reaktif
5	Mei	2	1 Reaktif, 1 Non Reaktif
6	Juni	2	1 Reaktif, 1 Non Reaktif
7	Juli	1	1 Non Reaktif
8	Agustus	2	2 Reaktif
	Jumlah	30	15 Reaktif, 15 Non Reaktif

Tabel di atas menggambarkan bahwa terdapat 30 orang data gay dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2016 yang terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Data ini sekaligus memberikan makna bahwa penderita HIV/AIDS sangat didominasi dari

¹⁶ Wawancara langsung dengan Bapak Marsal sebagai sekretaris KPA pada hari senin bulan oktober 2016 dan dikuatkan dengan Dokumen KPAK Kota Bukittinggi tahun 2016

komunitas LGBT. Populasi dari komunitas LGBT khususnya Gay, saat ini banyak berkembang di beberapa tempat khusus seperti salon, cafe, fitness club, dan tempat-tempat lainnya yang sering di kunjungi oleh para sopir taksi, tukang ojek dan anak sekolahan serta mahasiswa.

Permasalahan LGBT yang sudah terjangkau oleh KPA terdapat dari berbagai macam kalangan. Untuk menyikapi kondisi tersebut, KPA melakukan tindakan untuk memberikan pelayanan, pelatihan dan pembekalan guna untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara dengan KPA, bahwa KPA sebelum melakukan tindakan, telah mempelajari tentang latar belakang munculnya LGBT di Kota Bukittinggi. Penyebab berkembangnya LGBT di kota Bukittinggi disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kasus internal sampai ke persoalan eksternal dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan masalah ekonomi.¹⁷

B. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Perkembangan LGBT Di Kota Bukittinggi

Berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi di nilai telah memberikan dampak dan citra negatif terhadap kota Bukittinggi, karena kota Bukittinggi merupakan kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Semboyan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan simbol setiap adat yang berlaku di seluruh daerah di Sumatera Barat termasuk kota Bukittinggi.

Berkembangnya LGBT di Bukittinggi merupakan sebuah gambaran bahwa sebagai kota wisata, Bukittinggi yang sering disinggahi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri harus mempunyai kesiapan dalam menghadapi arus yang terkadang kehadirannya tidak bisa di lihat secara kasat mata. Bentuk nyata dari sebuah kesiapan pemerintah harus dimulai dari sebuah perencanaan yang matang.

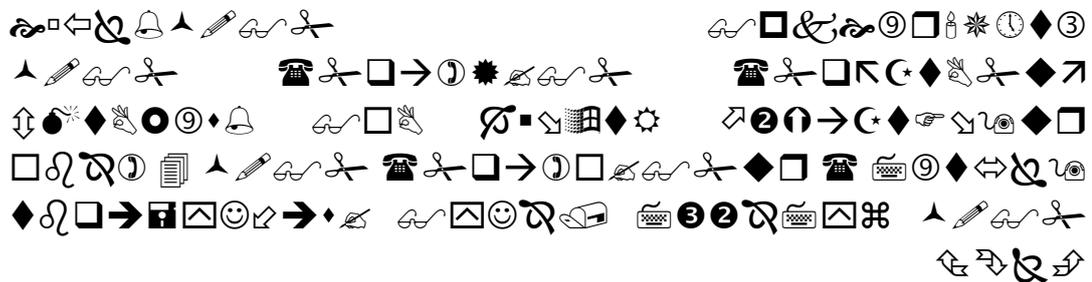
Perencanaan berarti memikirkan dalam membuat langkah-langkah sebelum melakukan sesuatu dengan mengupayakan sumber manusia dan sumber daya lainnya yang tujuannya agar semua yang diinginkan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana dilakukan, oleh siapa dan kapan dilakukan.¹⁸ Disamping itu, perencanaan meliputi penentuan tujuan organisasi untuk melaksanakan dan penentuan

¹⁷ Wawancara langsung dengan Bapak Marsal, sekretaris KPA Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Oktober 2016.

¹⁸Daryanto, *op cit*, h. 82

berbagai hal atau strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan (*planning, deciding what objectives to pursue during a future period and what to do to achieve those objectives*).¹⁹ Selanjutnya menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa perencanaan merupakan suatu usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akandikerjakan di masa depan dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁰

Sejalan dengan pendapat di atas, al-Qur'an juga menjelaskan tentang pentingnya sebuah perencanaan, yang terdapat dalam surat al-Hasyr ayat 18:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. 59:18)”²¹

Ayat ini menceritakan bahwa perencanaan merupakan dasar utama dalam melakukan sebuah kegiatan, baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pada masa yang akan datang, itu tergantung dengan bagaimana individu atau organisasi melakukan sebuah perencanaan, karena sukses atau tidaknya suatu pekerjaan tergantung dengan perencanaan awal sebelum melakukannya.

Dalam sebuah pemerintahan kota, Perencanaan Program Kerja merupakan kegiatan untuk menentukan sebuah tujuan berorganisasi dengan membuat berbagai rencana sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Bukittinggi yang akan dilaksanakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat Kota maupun seluruh masyarakat Kota Bukittinggi. Untuk itu tentu akan merujuk kepada visi dan misi dari Kota Bukittinggi. Visi Kota

¹⁹Rohmat, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi*, (Yogyakarta: STAIN Press, 2010),h. 72

²⁰ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 36

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009), h.

Bukittinggi adalah terwujudnya Bukittinggi Sebagai Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai-Nilai Agama dan Budaya. Misi Kota Bukittinggi adalah:

- a. Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat).
- b. Meningkatkan kinerja pemerintahan secara profesional, transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggung-jawabkan) dan mempunyai jiwa kewirausahaan.
- c. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan berwawasan lingkungan.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi perkotaan yang lebih berdaya guna.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Merujuk dari visi dan misi kota Bukittinggi, perencanaan program pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan LGBT, untuk saat ini pemda Bukittinggi belum mempunyai komisi khusus dalam upaya penanggulangan sekaligus membatasi berkembangnya LGBT ini. Hanya saja Pemda Bukittinggi telah melibatkan sekaligus telah meyerahkan wewenangnya terhadap Komisi Penanggulangan AIDS (untuk selanjutnya disebut KPA). KPA merupakan sebuah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. KPA dibentuk berdasarkan undang-undang kesehatan di Indonesia yang diatur melalui Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden RI No 75 tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.²²

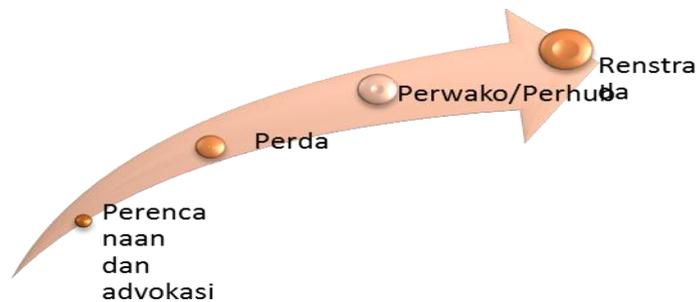
KPA Kota Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya telah mencanangkan beberapa program kerja untuk tahun 2016. Program kerja tersebut adalah²³:

²²Wawancara langsung dengan Bapak Yuen Karnova sebagai Sekda Kota Bukittinggi pada tanggal 28 November 2016

²³ Program kerja KPAK Bukittinggi Tahun 2016

- a. Peningkatan upaya pencegahan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan sistem layanan.
- d. Meningkatkan survei dan penelitian.
- e. Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi.
- f. Mobilisasi sumber daya.
- g. Advokasi pada stake holder terkait.

Dalam pelaksanaannya, KPA Kota Bukittinggi mengatur strategi dalam peraturan dan rencana kerja. Strategi tersebut bisa dilihat dari diagram di bawah :



Program kerja yang dirancang oleh KPA Kota Bukittinggi ditujukan terutama sekali adalah untuk menghimpun orang-orang yang beresiko terkena HIV/AIDS yang komunitas terbesarnya berasal dari pengguna narkoba, pengguna jarum suntik, wanita penaja seks, serta komunitas LGBT. Penghimpunan orang-orang yang beresiko tersebut bertujuan agar kelompok-kelompok ini bisa diberikan pengarahan dan bantuan rehabilitasi dalam upaya penanggulangan serta membatasi berkembangnya komunitas yang diperkirakan akan terus berkembang apabila tidak disikapi secara maksimal.²⁴

Rancangan program kerja tersebut juga merupakan hasil kolaborasi yang dilakukan oleh KPA dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di kota Bukittinggi, untuk membicarakan langkah-langkah kongkrit yang bisa dilakukan dalam menyikapi serta mangantisipasi berkembangnya kelompok-kelompok beresiko tersebut.

Pemerintah daerah Bukittinggi memberikan wewenang kepada KPA dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di Kota Bukittinggi agar bisa memberikan

²⁴ Wawancara langsung dengan Marsal, sekretaris KPA Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Oktober 2016

informasi dan menanggulangi orang yang berisiko, KPA didirikan pada bulan Mei tahun 2008. Adapun dasar hukum dari KPA adalah sebagai berikut²⁵:

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006, tentang komisi penanggulangan AIDS Nasional.
- b. Permendagri No.20 Tahun 2007 tentang pedoman umum pembentukan komisi penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.
- c. Peraturan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor 3 tahun 2007 tentang KPA Nasional.
- d. Peraturan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor 04 tahun 2007 tentang KPA Propinsi dan Kabupaten/ Kota.
- e. Peraturan Menteri Koordinator bidang kesejahteraan rakyat nomor 06 tahun 2007 tentang tim pelaksanaan KPA Nasional.
- f. Strategi dan rencana aksi nasional penanggulangan HIV dan AIDS TAHUN 2014.
- g. SK WALIKOTA BUKITTINGGI No. 188.45-153-2008 tentang pembentukan Komisi penanggulan AIDS Kota Bukittinggi (KPAK Bukittinggi) dan SK perubahan walikota bukittinggi Nomor 188.45-78-2012.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari KPA sesuai dengan Perpres No.75 tahun 2006 adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HI dan AIDS.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi (Pemerintah, LSM, Profesi, swasta, institusi layanan kesehatan, dll) yang bergabung dalam keanggotaan KPA Prov, Kab/ Kota.
- c. Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS.
- d. Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulan HIV dan AIDS kepada aparat masyarakat.
- e. Memfasilitasi KPA Kab/Kota (KPAP) dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Camat dan pemerintahan desa dalam penanggulangan HIV dan AIDS (KPA K/K).
- f. Mendorong terbentuknya LSM/Kelompok peduli HIV dan AIDS.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dn AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada KPAN.

AIDS merupakan singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome*, yaitu suatu kumpulan gejala yang ditimbulkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dinamakan HIV atau *Human Immuno Deficiency Virus*. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh (sel darah putih). Sistem kekebalan tubuh biasanya melindungi tubuh terhadap serangan dari penyakit-penyakit yang akan masuk. Tetapi bila tubuh telah terinfeksi oleh HIV, secara otomatis kekebalan tubuh akan berkurang dan menurun sampai suatu saat tubuh tidak lagi mempunyai daya tahan terhadap penyakit. Bila menderita penyakit yang biasanya tidak berbahaya pun, misalnya influenza atau penyakit ringan lainnya akan susah sembuh dan membuat orang tersebut menderita atau bahkan meninggal.²⁷

Penderita dari penyakit HIV tersebut tergolong dari bagian LGBT. LGBT merupakan sebuah gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Keberadaan LGBT selalu menjadi objek penghinaan dan kekerasan oleh masyarakat karena dianggap melawan kodrat. Penolakan dan kekerasan itu meyebabkan kaum homo pergi dan berkumpul dengan sesamanya. Hal tersebut membuat kaum LGBT dianggap eksklusif.

Kondisi seperti ini membutuhkan usaha dan upaya khusus dalam penanggulangannya. Meskipun Pemda Bukittinggi belum mempunyai komisi khusus dalam menyikapi persoalan LGBT, akan tetapi beberapa cara sudah dilakukan oleh lembaga FORSIS sebagai salah satu LSM yang telah berkolaborasi dengan KPA Kota Bukittinggi. Berdasarkan keterangan dari Sekeretaris FORSIS, Bapak Zulkarnain beberapa cara yang sudah dilakukan adalah dengan bentuk²⁸:

1. Intervensi Perubahan prilaku.

Intervensi Perubahan Prilaku merupakan pendekatan umum yang merupakan upaya mengubah prilaku beresiko dan mempertahankan prilaku positif melalui kegiatan atau serangkaian kegiatan sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok dengan menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya perubahan individu dan kelompok. Dalam melakukan Intervensi perubahan prilaku ini perlu dengan

²⁷Wawancara langsung dengan Bapak Khairul Anwar sebagai direktur FORSIS Kota Bukittinggi, Rabu 2 November 2016

²⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulkarnain, Sekretaris FORSIS, Senin tanggal 19 Desember 2016

melakukan beberapa hal, yaitu komunikasi perubahan perilaku, advokasi, mobilisasi komunitas, mobilisasi sosial dan jaringan layanan.

Intervensi Perubahan Perilaku tidak hanya fokus pada perubahan perilaku individu, tetapi juga mengusahakan transformasi lingkungan sosial di tempat dimana perubahan akan dilakukan. Agar Intervensi ini bisa tercapai maka FORSIS melakukan intervensi ini dengan sebuah proses yang jelas dengan cara melakukan pendekatan secara emosional untuk bisa memberikan arahan, dengan menggunakan langkah jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendampingi strategi perubahan perilaku melalui pendidikan dan regulasi dengan strategi paksaan atau *enforcement*. Paksaan yang dimaksud di sini lebih merupakan paksaan positif, yakni memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling mengingatkan, mengajak, memberikan sanksi sosial kelompok, memberikan *reward* kelompok dan sebagainya. Pendekatan ini juga memerlukan penyesuaian tugas Penjangkau Lapangan untuk merujuk langsung komunitas berisiko yang bertujuan agar komunitas LGBT memahami bahwa komunitas yang mereka kembangkan pada dasarnya tidak sesuai dengan kodrat manusia itu sendiri.

Selanjutnya dukungan pemerintah dalam melakukan penjangkauan terhadap komunitas ini dengan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Peningkatan Iman dan Taqwa

Karunia terbesar dari Allah SWT kepada hamba-Nya adalah karunia keimanan. Karena keimanan kebaikan menjadi manfaat, kebajikan menjadi *maslahat*, dan sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan juga dapat dijadikan sebagai motivator, dinamisator dan sumber kebaikan tertinggi dalam kehidupan manusia di dunia. Iman merupakan dasar segala amal perbuatan manusia. Ia adalah *imam* (pe-mimpin) tertinggi yang akan memimpin manusia kepada tujuan dan akhlak yang baik.

Konsep iman pada dasarnya sangat luas karena mencakup seluruh aspek kepribadian dan kehidupan manusia. Akan tetapi arti dan tujuan serta pengaruh iman terkadang terasa dangkal bahkan mengalami inflasi sehingga dampaknya bagi tingkah laku dan perbuatan manusia tidak begitu terlihat. Padahal orang yang beriman adalah orang yang dekat dengan Allah SWT. serta memperoleh kesuksesan dalam

kehidupannya di dunia dan akhirat. Seseorang yang tidak memiliki visi tentang kebenaran keimanan maka tidak akan merasuk ke dalam jiwanya dan tidak membuahkkan amal kebaikan dan ketaatan. Agar keimanan bisa merasuk ke dalam jiwa dan dapat membuahkkan amal kebaikan dan ketaatan maka perlu ditanamkan sejak usia dini.

Upaya ini sudah dijalani dan dikembangkan pemda Bukittinggi dengan menjalin kordinasi dengan MUI kota Bukittinggi. Beberapa penyuluhan dan sosialisasi terhadap prilaku menyimpang diharapkan agar seluruh masyarakat mewaspadaai untuk berkembangnya komunitas ini. Himbauan dan seruan untuk mewaspadaai ini sudah disampaikan juga kepada lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Peningkatan iman dan taqwa oleh masing-masing keluarga tetap menjadi modal utama dalam upaya penanggulangan LGBT di Bukittinggi.

3. Pendekatan Psikologi

Gejolak dan proses serta dinamika di masyarakat dalam *frame* globalisasi yang melanda dunia modern telah melahirkan berbagai macam konsep, *term* dan bahkan teori baru. Perkembangan keilmuan psikologi, pendidikan serta bimbingan dan konseling menjadi salah satu indikator dari semakin pesatnya perkembangan ilmu dunia modern.

Konseling dalam seting pendidikan dituntut untuk mampu menjawab berbagai permasalahan serta problematika yang dialami oleh masyarakat. Terkait masalah yang dialami oleh masyarakat berkaitan dengan era kekinian antara lain adalah masalah yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi, perbedaan budaya, isu-isu gender, gaya hidup dan masih banyak masalah lainnya. Dalam hal ini yang peneliti maksud adalah masalah LGBT.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian tentang adanya *transgender, gay dan lesbian* terutama di masyarakat, maka konselor dan profesi *helper* lainnya seperti psikolog dan bahkan psikiater sebagai salah satu komponen pendidikan dirasa perlu untuk mengatasi dan mengantisipasi segala bentuk potensi permasalahan yang muncul akibat fenomena tersebut. Konselor dan profesi *helper* lainnya seperti psikolog dan psikiater dengan segala karakteristik, nilai dan budaya yang ada pada dirinya diharapkan mampu menangani klien dengan berbagai latar belakang nilai dan budaya yang berbeda termasuk gaya hidup alternatif yang dipaparkan di atas.

Menurut kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One* (2006) fenomena transgender muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Namun dalam sudut pandang ilmu kesehatan mental, transgender bisa muncul dipengaruhi oleh budaya, fisik, seks, psikososial, agama dan aspek kesehatan. Banyaknya penyebab muncul fenomena transgender dapat menjadi kajian tersendiri bagi konselor dan profesi *helper* lainnya seperti psikolog dan psikiater yang menangani masalah tersebut. Semakin kompleks masalah yang dialami klien, maka semakin memerlukan diagnosis khusus terhadap masalah tersebut.

Konteks yang lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang muncul dari seorang klien yang mendefinisikan dirinya sebagai seorang *lesbian, gay bisexual* dan *transgender* adalah munculnya masalah-masalah seperti (1) gambaran diri (2) gagal dan kerugian (3) isolasi sosial (4) fokus spiritual dan agama. Seluruh masalah tersebut menjadi tantangan bagi konselor dan profesi *helper* lainnya seperti psikolog dan psikiater ketika berhadapan dengan konseli/klien *lesbian, gay, bisexual* dan *transgender*.

Pendekatan psikologi terhadap komunitas LGBT di Kota Bukittinggi dengan memberikan motivasi yang kuat dari lingkungan keluarga terdekat. Motivasi yang kuat bisa berkembang dengan meningkatkan ketaqwaan, karena taqwa merupakan sumber dari sebuah motivasi. Setiap komunitas diberikan pendampingan untuk kembali menyadari bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku yang secara kodrati kemanusiaan telah berlawanan dengan kodratnya masing-masing.

Semua upaya di atas, terkadang mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena FORSIS hanya suatu lembaga yang berfungsi untuk melakukan penjangkauan terhadap komunitas tertentu dari beberapa target yang ada. Untuk memberikan tindakan yang lebih maksimal terhadap komunitas LGBT ini, FORSIS mengembalikan upayanya kepada KPA Kota Bukittinggi.

Evaluasi adalah penilaian sistematis dan objektif dari rencana, implementasi, dan hasil dari suatu kegiatan atau program yang sedang berlangsung ataupun yang telah selesai. Dengan kata lain, evaluasi merupakan proses penentuan sesuai atau tidaknya suatu kebijakan, program, atau kegiatan yang diukur secara sistematis dan

objektif dari rencana, pelaksanaan (*on-going*), atau capaian²⁹. Evaluasi secara umum mempertimbangkan kesesuaian sumber yang digunakan dan waktu dalam implementasinya. Oleh karena itu, evaluasi harus dilakukan secara optimal guna memperoleh hasil yang baik. Selain itu evaluasi seharusnya juga menyediakan informasi yang kredibel dan berguna, guna menghasilkan *feedback* yang dapat digunakan sebagai masukan untuk perencanaan yang akan datang.

Perencanaan yang dikombinasi dengan monitoring dan evaluasi dapat berperan penting dalam peningkatan efektifitas program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan membantu untuk fokus pada hasil, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa lampau serta memberikan informasi untuk pembuatan keputusan sehingga periode saat ini dan masa yang akan datang akan menjadi lebih baik. Dengan demikian antara perencanaan, monitoring, dan evaluasi memiliki suatu keterkaitan. Namun demikian perlu dicatat bahwa evaluasi tidak selalu ditempatkan di tahap akhir, tetapi evaluasi dapat ditempatkan di setiap tahapan proses program atau kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan aktivitas dalam manajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, ataupun pertanggungjawaban³⁰. Setiap tahapan berisikan kegiatan pengumpulan dan analisis mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian hasil kegiatan pelaksanaan, ketepatan sistem dan proses pelaksanaan, dan ketepatan kebijakan serta akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan. Evaluasi yang dilakukan pada tahap pemantauan didasarkan atas hasil dari pelaksanaan pemantauan. Dengan kata lain hasil dari pelaksanaan pemantauan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan maupun kebijakannya itu sendiri, agar rumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik, dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal.

²⁹Imas, L.G.M., R.C. Rist, 2009. *The Road to Results; Designing and Conducting Effective Development Evaluations*. The World Bank. Washington DC

³⁰Mustopadidjaja, AR., 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation. Jakarta

Di samping memuat gambaran perkembangan pelaksanaan, laporan pemantauan juga memuat identifikasi kelemahan kebijakan dan penyimpangan terhadap sistem dan proses pelaksanaan kebijakan, serta saran koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan ataupun terhadap kebijakan itu sendiri. Evaluasi kinerja dalam rangka pengawasan harus dapat memberikan informasi objektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu, mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, serta rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Pada tahap pertanggungjawaban, evaluasi kinerja harus dapat memberikan gambaran dan analisis objektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan berikut alasannya, dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu.

Selain evaluasi yang dilakukan pada tahap pemantauan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, evaluasi juga dapat dilakukan secara komprehensif. Evaluasi kebijakan secara komprehensif dapat meliputi: 1) penilaian mengenai latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan; 2) berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan yang dilaksanakan; 3) respon kelompok sasaran dan stakeholders lainnya; 4) konsistensi aparat; 5) dampak yang timbul; 6) perubahan yang ditimbulkan dan perkiraan kemajuan yang dicapai jika kebijakan dilanjutkan atau diperluas³¹. Evaluasi kebijakan komprehensif pada umumnya dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi atau dalam mencapai tujuan yang direncanakan, dengan maksud untuk mengkaji kemungkinan perubahan ataupun penyesuaian kebijakan (*policy changes and/or adjustments*). Oleh sebab itu evaluasi kebijakan dapat pula menyentuh pengujian mengenai validitas dan relevansi teori yang melandasi suatu kebijakan. Evaluasi kinerja kebijakan merupakan bagian dari evaluasi kebijakan yang secara spesifik terfokus pada berbagai indikator kinerja bertalian dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan hubungan atau keserasian antar evaluasi kinerja baik dalam rangka pemantauan, pengawasan, ataupun

³¹ Ibid,

pertanggungjawaban. Maka wewenang yang diberikan pemda Kota Bukittinggi kepada KPA berkolaborasi dengan:

- a. Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Kota Bukittinggi. KPA memberikan rujukan kepada RSAM untuk mendapatkan Pelayanan agar bisa mengatasi masalah yang berisiko tersebut.
- b. SATPOL Pamong Praja Kota Bukittinggi membeikan pengawasan kepada masyarakat Kota Bukittinggi guna untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat agar terhindar penyakit yang berisiko.

Adanya kolaborasi antara KPA dengan RSAM dan SATPOL PP di atas maka program dan target yang telah dirancang Pemda Kota Bukittinggi tentu berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga mudah untuk melakukan pengawasan (*controlling*). Akhirnya tercapailah program kerja Pemda Kota Bukittinggi sesuai dengan yang diharapkan.

PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perkembangan LGBT di Kota Bukittinggi keberadaannya telah terdeteksi lebih kurang dalam dua tahun terakhir. Untuk bisa mendapatkan data perkembangan komunitas LGBT ini, diperoleh melalui data-data yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bukittinggi. Hal ini di tandai bahwa dari penderita HIV/AIDS yang ditemui oleh KPA terdapat diantaranya dari komunitas LGBT.
2. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Perkembangan LGBT Di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Intervensi Perubahan prilaku. Agar Intervensi ini bisa tercapai maka FORSIS melakukan intervensi ini dengan sebuah proses yang jelas dengan cara melakukan pendekatan secara emosional untuk bisa memberikan arahan, dengan menggunakan langkah jangka pendek yang dapat dilakukan adalah mendampingi strategi perubahan perilaku melalui pendidikan dan regulasi dengan strategi paksaan atau *enforcement*.
 - b. Peningkatan Iman dan Taqwa. Upaya ini dilakukan pemda dengan menjalin kordinasi dengan MUI kota Bukittinggi. Beberapa penyuluhan

dan sosialisasi terhadap perilaku menyimpang diharapkan agar seluruh masyarakat mewaspadaikan untuk berkembangnya komunitas ini. Himbauan dan seruan untuk mewaspadaikan ini sudah disampaikan juga kepada lembaga pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Peningkatan iman dan taqwa oleh masing-masing keluarga tetap menjadi modal utama dalam upaya penanggulangan LGBT di Bukittinggi.

- c. Pendekatan psikologi. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan memberikan motivasi yang kuat dari lingkungan keluarga terdekat. Motivasi yang kuat bisa berkembang dengan meningkatkan ketaqwaan, karena taqwa merupakan sumber dari sebuah motivasi. Setiap komunitas diberikan pendampingan untuk kembali menyadari bahwa perilaku LGBT merupakan perilaku yang secara kodrati kemanusiaan telah berlawanan dengan kodratnya masing-masing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Masyitah Ibrahim "*Program Ikut Telunjuk Nafsu*", Artikel diakses pada 20 May 2013, dari <http://www.utusan.com.my>.
- Sri Habsari, diakses pada 24 May 2013 dari <http://books.google.co.id>.
- Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, Jurnal al-Islâm: May 2011.
- Noor Azilawati Mohd Sabda, *Siri Pemupukan Motivasi Insan, Menghindari Ancaman Seksual*, T. t: Pinang SDN.BHD.
- Rehani, *Berawal dari Keluarga; Revolusi Belajar Cara Al-qur'an*, Jakarta: Hikmah, 2003.
- <http://daerah.sindonews.com/read/1086839/174/10-wanita-diduga-pasangan-lesbian-terjaring-razia-1455916255>di akses pada hari kamis tanggal 3 Maret 2016.
- Wawancara pribadi dengan Bapak Marsal sebagai Sekretaris KPA Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Oktober 2016.
- Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar sebagai Direktur Forsis pada hari Rabu bulan Oktober 2016 dilengkapi dengan Dokumen Forsis Tahun 2016.
- Wawancara langsung dengan Bapak Marsal sebagai sekretaris KPA pada hari senin bulan oktober 2016 dan dikuatkan dengan Dokumen KPAK Kota Bukittinggi tahun 2016.
- Rohmat, *Kepemimpinan Pendidikan Konsep Dan Aplikasi*, Yogyakarta: STAIN Press, 2010.
- Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: PT. Riels Grafika, 2009.
- Wawancara langsung dengan Bapak Yuen Karnova sebagai Sekda Kota Bukittinggi pada tanggal 28 November 2016.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Zulkarnain, Sekretaris FORSIS, Senin tanggal 19 Desember 2016.
- Imas, L.G.M., R.C. Rist, 2009. *The Road to Results; Designing and Conducting Effective Development Evaluations*.The World Bank. Washington DC.
- Mustopadidjaja, AR., 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara-Duta Pertiwi Foundation. Jakarta
- Abu Ameenah Philips dan Dr.Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003
- Afnidar Ramadhani, *Gambaran Gaya Hidup (Life Style) Beresiko Dikalangan Homoseksual (Gay) di Kota Medan*, USU: Skripsi, 2011

Agung Dirga Kusuma, *Pembentukan Perilaku Seksual pada Pasangan Lesbian dan Gay di Yogyakarta*, UIN Yogyakarta: Skripsi, 2014

Ainurrofiq Dawam, “*Sigmund Freud dan Homoseksual (sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)*” dalam *Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol 2, No. 1, Maret, 2003